



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN KECURANGAN: SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KESESUAIAN KOMPENSASI

Cris Kuntadi¹, Bhayu Adi Puspita², Achmad Taufik³

¹Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

²Mahasiswa Politeknik STIA LAN, Indonesia, surya.bhayu@gmail.com

³Mahasiswa Politeknik STIA LAN, Indonesia, taufik.achmad86@gmail.com

Korespondensi Penulis: Bhayu Adi Puspita²

Abstrak: Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan, beberapa hal telah diteliti terkait dengan kecurangan. Salah satunya Sistem Pengendalian Intern, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam PP. 60 Tahun 2008 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, dengan diterapkannya sistem pengendalian intern ini diharapkan dapat mengurangi segala kecurangan dan kecurangan yang mungkin terjadi untuk mendukung efektifitas kerja pemerintah dalam mencapai tujuannya. Faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya kecurangan adalah kompetensi pegawai, karena telah ada penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, penipuan terjadi karena kurangnya kompensasi yang diterima seseorang, sehingga mereka mencari keuntungan pribadi dengan penipuan. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan, hal ini dikarenakan menurut persepsi karyawan perusahaan telah memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang telah karyawan berikan kepada organisasi. Sehingga karyawan tidak boleh berpikir untuk melakukan kecurangan karena merasa kompensasi yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Kecurangan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Pegawai, Kesesuaian Kompensasi.

PENDAHULUAN

Kecenderungan kecurangan atau dalam bahasa audit disebut dengan *fraud* merupakan bahaya besar yang mengancam sektor privat maupun sektor publik. Pada sektor publik, kecurangan dilakukan dalam bentuk kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pada sektor privat, hampir sama dengan pada sektor publik, kecurangan terjadi pada ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber pendanaan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, *Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh

satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. *Fraud* dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu korupsi, penyalagunaan aktiva/kekayaan, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Dari ketiga jenis *fraud* tersebut, yang paling merugikan khususnya di Indonesia adalah korupsi. Kesempatan dalam melakukan tindak kecurangan biasanya disebabkan antara lain oleh lemahnya Sistem Pengendalian Internal dan ketidakdisiplinan. Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, 2008).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi risiko fraud atau kecurangan yang semakin besar ketika saat pandemi Covid-19. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif berbasis resiko pada kementerian/ lembaga terkait program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Dari hasil pemeriksaan komprehensif berbasis risiko yang telah dilakukan oleh BPK, terungkap sebanyak 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan efektivitas. Dalam pemeriksaan PC-PEN selama tahun 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodefikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, manajemen program dan kegiatan pandemi.

Timbul pertanyaan terkait kecurangan, yaitu mengapa masih ada oknum-oknum pejabat negara yang melakukan *fraud* atau kecurangan? Mengapa pejabat tinggi dengan kedudukan dan tentu saja penghasilan yang tinggi masih melakukan kecurangan? Jawaban sederhananya adalah kebutuhan, keserakahan dan peluang adalah akar dan penyebab utama korupsi. Seperti yang diungkapkan *corruption (fraud) by need, by greed and by opportunity* (Kotta T.M, 2010).

Secara rinci tujuan dari penulisan *Literature Review Paper* ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variable eksogen (X1) Sistem Pengendalian Internal, (X2) Kompetensi Sumber Daya Manusia, (X3) Kesesuaian Kompensasi, (Y) Kecenderungan Kecurangan.

Artikel ini khusus membahas faktor Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kesesuaian Kompensasi (X1, X2, & X3) yang memengaruhi perilaku kecurangan (Y). *Literatur Review* paper ini mungkin tidak membahas semua faktor yang memengaruhi nilai-nilai kedisiplinan namun *Literatur Review* paper ini hanya membahas sebagian kecil saja yang akan dikaji dan direview.

Berdasarkan latar belakang akan dirumuskan masalah yang akan dibahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

- 1) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- 2) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- 3) Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

KAJIAN PUSTAKA

Perilaku Kecurangan (Y)

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mendapatakan uang, aset dan lain sebagainya sehingga merugikan orang lain atau pihak tertentu (Aini et al., 2017). Kecurangan cenderung terjadi karena keinginan melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan menggunakan cara yang tidak jujur (Amiruddin dan Kartini, 2017). Kecurangan akuntansi sering terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka lebar dalam organisasi, semakin lebar suatu kesempatan tercipta maka semakin besar pula kemungkinan terjadi kecurangan akuntansi (Dorminey et al., 2010). Albrect (dalam Faruqi dan Kristianti, 2019)

mendefinisikan fraud sebagai segala cara yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajian yang tidak sesuai.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Kecurangan merupakan tindakan yang dirancang sebelumnya untuk mengelabui/menipu/memanipulasi pihak lain sehingga mengakibatkan pihak lain menderita kerugian dan pelaku kecurangan memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (Kuntadi, 2015:13).

Ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan (Kuntadi, 2015:27):

- 1) Kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan
- 2) Insentif/tekanan, yaitu manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan
- 3) Rasionalisasi/Pembenaran, yaitu ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur.

Sistem Pengendalian Internal (X1)

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998), Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kepercayaan terkait capaian ketaatan kepada aturan, efisiensi kegiatan, serta kehandalan laporan keuangan. Pengendalian yang tidak efektif dalam suatu organisasi dapat memberi celah adanya niat untuk melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Ketidak-efektifan pengendalian internal mempermudah pegawai dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, sehingga ketidak-efektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi penting untuk diperhatikan berkaitan dengan adanya tindakan fraud dalam organisasi tersebut. menurut Atmadja dan Saputra (2017) dalam Njonjie et.al (2019) menyatakan bahwa terjadinya kecurangan mengindikasikan sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya fraud. Dengan kata lain selain perlunya kompetensi aparatur, juga memerlukan sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: : (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam suatu entitas atau organisasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Kompetensi adalah karakteristik bahwa individu memiliki kemampuan dan digunakan dengan cara yang konsisten sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Karakteristik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, aspek citra diri, motif sosial, sifat, pola pikir dan cara berpikir, perasaan, dan pelaksanaan (Dubois, 2004). Menurut Sanghi (2007) kompetensi adalah suatu proses yang mengacu pada berbagai keterampilan yang harus dilakukan dan perilaku yang harus diterapkan dalam kinerja yang kompeten.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan karakteristik bahwa seseorang atau individu tersebut memiliki kemampuan yang digunakan secara konsisten guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Sumber Daya Manusia merupakan pilar penggerak utama dalam menggerakkan roda organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Ariastini, (2017) dalam Hariawan, (2020).

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/atau keahlian, serta sikap kerjayang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketidaksesuaian Kompensasi (X3)

Menurut Hariandja (2005), kompensasi adalah imbalan yang diperoleh pegawai berbentuk uang maupun lainnya akibat dari kontribusi yang diberikan kepada perusahaan yang berbentuk upah, gaji, tunjangan, insentif, dan bonus lainnya yang di berikan oleh perusahaan. Hasibuan (2003) mendefinisikan kompensasi sebagai imbalan yang layak dan adil yang diterima karyawan atas kontribusi dalam menggapai sasaran instansi.

Merujuk Kasmir (2002), agar kompensasi yang diberikan wajar dan adil sesuai dengan tujuan organisasi dapat tergapai, maka kompensasi harus dirancang dan dibuat mengacu pada pengalaman dan pendidikan serta beban kerja. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan jasa yang dikeluarkan pegawai dapat mengakibatkan pegawai merasa berhak melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan yang dirasa sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan pegawai, termasuk upaya untuk melakukan kecurangan dalam rangka mensejahterakan diri sendiri maupun keluarganya.

Mathis dan Jackson (2001) dalam Firnanda et.al (2019) menyatakan bahwa cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah dengan memberikan kompensasi. dengan memberikan kerja kerasnya, seorang karyawan menunjukkan loyalitasnya terhadap perusahaan, sehingga atas prestasi kerja karyawan tersebut, perusahaan kemudian memberikan kompensasi berupa penghargaan atau reward. Kajian Pustaka dalam suatu pengaturan karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai penegasan terhadap keterbatasan karya ilmiah. Intisari dalam bagian ini dimuat secara lengkap di keyword di bagian abstrak. Karena itu, persiapan karya tulis apa pun harus diwajibkan membuat studi literatur.

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan penelitian Sistem Pengendalian Internal (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan Kesesuaian Kompensasi (X3) yang memengaruhi Kecurangan (Y) yang tergambar:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan Artikel Ini	Perbedaan dengan Artikel Ini
1	Pane (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Perilaku Kecurangan	tidak ada karena variabel yang penelitian sebelumnya hanya 1 variabel
2	Setiawan, Alfianto & Kusumo (2019)	Keefektifan sistem pengendalian internal termasuk dalam kategori efektif	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Perilaku Kecurangan	Ruang lingkup yang ditentukan
3	Dewi dan Rasmini (2019)	Kompetensi sumber daya manusia dalam pengetahuan, keahlian dan berperilaku dapat mencegah terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan dana desa	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud	Pengaruh <i>Locus Of Control</i> pada Pencegahan <i>Fraud</i>
4	Rio Antoni, Enggar Diah PA, Fitriani Mansur (2021)	terdapat pengaruh positif Kompetensi SDM terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan fraud	Hasil penelitian membawa dampak yang berbeda pada objek
5	Septiana dan Prasetyo (2021)	Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya dengan penerapan kompensasi yang baik, kecil kemungkinan karyawan melakukan kecurangan.	Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan	Tidak ada
6	Karsam Sunaryo, Irma Paramita S, Sifra Raissa. (2019)	kesesuaian kompensasi, secara parsial berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi	Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan	Ruang lingkup penelitian berbeda
7	Setiawan, Alfianto, Kusumo (2020)	pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan fraud di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara	Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud	Faktor-faktor yang memengaruhi lebih banyak

		budaya etis organisasi dengan fraud di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum dengan fraud di sektor pemerintahan		
8	Guztarina, Azmi, & Murialti (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.	Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud	Ruang lingkup objek yang diteliti
9	Septiningsih, & Anwar (2021)	pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap fraud dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening di Pemerintah Daerah Boyolali	keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud	Hasil penelitian membawa dampak yang berbeda
10	Pambudi, Dewangkoro, & Dwimulyani (2019)	Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh negatif Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Organisasi, Penegakan Hukum terhadap kecurangan di sektor pemerintah, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap kecurangan di sektor pemerintah	Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud	Tidak ada
11	Noprianto, Rahayu, & Yudi (2022)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa	Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud	Tidak ada

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau Library Research. Mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di bidang Keuangan Negara. Penulisan artikel ilmiah ini juga menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi maupun yang belum bereputasi dan di citasi bersumber dari Mendeley dan

Scholar Google. Kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis dalam penelitian kualitatif. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul "Pustaka Terkait" (Related Literature) atau kajian pustaka (Review of Literature), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Pane (2018) melakukan penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan: Survei pada Pemprov Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap perilaku kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di satu instansi pemerintahan dapat menekan atau mengurangi terjadinya tindak kecurangan. Sari (2013) dalam Ariastini (2017) berpendapat pelaksanaan pengendalian internal diharapkan dapat menghapus praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan dijalankan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma dan Setiawan (2017) yang melakukan penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana BOS se-Kabupaten Klungkung. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS. Hal ini membuktikan semakin tinggi tingkat sistem pengendalian internal oleh pemerintah, maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS di Kabupaten Klungkung. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat pengendalian internal oleh pemerintah, makin semakin rendah juga tingkat pencegahan fraud.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Kecurangan

Dewi dan Rasmini (2019) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti, kompetensi sumber daya manusia dalam pengetahuan, keahlian dan berperilaku dapat mencegah terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan dana desa. Berbeda dengan Dewi dan Rasmini (2019), penelitian yang dilakukan oleh Antoni, Diah PA & Mansur (2021) tentang Faktor Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi), menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam sektor pemerintahan. Kompetensi seseorang akan menentukan hasil dan kualitas dari pekerjaannya, karena dapat melakukan pekerjaan dengan mudah, intuitif dan minim terjadinya kesalahan. Penelitian juga menyimpulkan semakin tinggi kompetensi pejabat keuangan, maka semakin tinggi juga kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

Hasil penelitian Dewi dan Rasmini (2019), konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma dan Setiawan (2019) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Hasil penelitian menghasilkan Kompetensi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi kompetensi seseorang, maka semakin rendah seseorang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbuatan kecurangan akan semakin dijauhkan jika seseorang semakin berpengalaman di bidangnya.

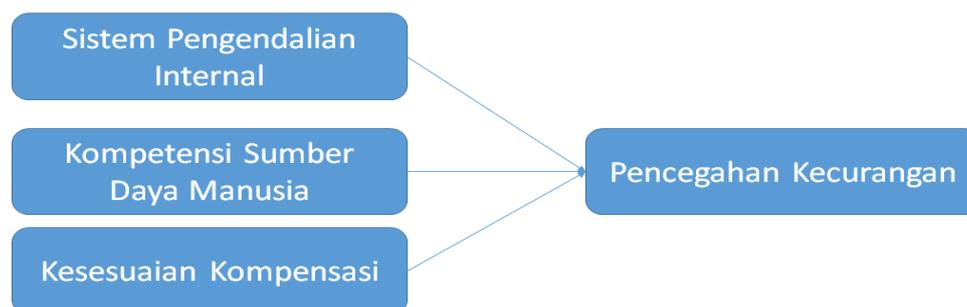
Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan

Di Indonesia, kebijakan sistem remunerasi merupakan kebijakan yang disusun dalam rangka menata sistem penggajian para Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak tergiur untuk melakukan tindakan kecurangan karena telah memiliki tanggung jawab lebih. Hasil penelitian dari Farah & Rahmawati (2021), tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Melakukan Kecurangan (Fraud), memberikan hasil yaitu sistem remunerasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan (Fraud). Artinya sistem remunerasi yang semakin baik yang ada pada instansi maka kemungkinan melakukan tindak kecurangan (fraud) oleh pegawai semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Farah & Rahmawati juga konsistens dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Prasetyo (2021), dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya dengan penerapan kompensasi yang baik, kecil kemungkinan karyawan melakukan kecurangan.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literaturereview baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di perolah rerangka artikel ini seperti dibawah ini.



Gambar 1. Conceptual Framework

Berdasarkan kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual framework, maka: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Pencegahan Kecurangan, masih banyak variabel lain yang memengaruhi diantaranya adalah:

- 1) Moralitas Individu: (Septiningsih, & Anwar ,2021), (Gustarina, Azmi & Murialti, 2021) dan (Setiawan, Alfianto, & Kusumo, 2020)
- 2) Budaya Organisasi: (Prambudi, Dewangkoro, & Dwimulyani 2019), (Novitasari & Akbar, 2021), dan (Noprianto, Rahayu, & Yudi, 2022)
- 3) Gaya Kepemimpinan: (Setiawan, Alfianto, & Kusumo, 2020), (Saputra & Anisma, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori dan pembahasan atas artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi pencegahan kecurangan, selain dari Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kesesuaian Kompensasi pada semua level dan organisasi publik, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi motivasi selain yang variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti Moralitas Individu, Budaya Kerja Organisasi dan Gaya Kepemimpinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, N., Prayudi, M. A., & Diatmika, P. G. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Lombok Timur). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 199-210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Amiruddin, & Kartini, G. P. (2017). The Performance Of Government Auditors In Perspectives Ethical Behavior And Tendency Of Accounting Fraud. *IOSR Journal of Economics and Finance Ver. IV*, 8(4)
- Antoni, R., Diah P.A, E., & Mansur, F. (2022). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 2(1), 1-13.
- Ariastini, N.K.D., Yuniarta, G.A., Kurniawan,N.P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Se-kabupaten Klungkung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8(2)
- Dewi Septiningsih, & Saiful Anwar. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Fraud Pemerintah Daerah: Peran Intervening Perilaku Tidak Etis. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 17–35.
- Dorminey, J., A.S., F., M.-J, K., & R.A., R. (2010). Beyond the fraud triangle: Enhancing deterrence of economic crimes. *The CPA Journal*, 17–23.
- Farah, W., & Rahmawati, D. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). *Akuntabilitas*, 14(1), 127138.
- Gustarina, D., Azmi, Z., & Murialti, N. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Rumah Sakit Kota Pekan Baru. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204.
- Hariandja, Marihot T. Efendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hariawan, I. M., Sumadi, N., & Erlinawati, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan

- Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 586-61
- Hasibuan, Malayu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karsam Sunaryo, Irma Paramita S, Sifra Raissa. (2019). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(1), 71-84
- Kasmir. 2002. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kotta T.M, T. (2010). In Akuntansi Forensik dan audit investigatif (p. Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat
- Kuntadi, Cris. 2015. SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- KurniasariN. T., FariyantiA., & RistiyantoN. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(-)
- Mulyadi dan Puradiredja, K. 1998. Auditing. 5th Ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Njonjie, P., Nangoi, G., Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill, 10 (2)
- Noprianto, E., Rahayu, S., & Yudi. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 5(4), 258-267.
- Novitasari, S., dan, Akbar, FS. (2021). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud. Senapan.Upnjatim.Ac.Id, 1(1), 282–290.
- Pane, Aditya A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan: Survei Pada Pemprov Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4 (2): 40-48
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Prambudi, R., Dewangkoro, B., & Dwimulyani, S. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kecurangan Pada Sektor Pemerintahan (Studi Penelitian Pada Kementerian Perdagangan). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 4(2), 209–228.
- Dubois, D., Rothwell, J. W. (2004). Competency Based Human Resource Management. Davies-Black Publishing
- Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organization. Sage Publication Pve, Ltd.
- Septiningsih, Dewi dan Saiful Anwar. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi FraudPemerintah Daerah: Peran InterveningPerilaku Tidak Etis. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 16(1), 17-35.
- Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintaha Pada Dinas Kota Semarang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 21(1), 68.
- Wirakusuma, I., & Setiawan, P. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 26(2), 1545 - 1569.
- Dewi & Rasmini (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. E-Journal Akuntansi, E-Jurnal Akuntansi, 29 (3), 1071-1082.